DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2002-2012

Skripsi Oleh:

TIARA AMANDA YAZA PUTRI

01101002073

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

S
336.307
Tia
d
2014.
R 26381 / 26942.

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2002-2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi Oleh:

TIARA AMANDA YAZA PUTRI

01101002073

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2002-2012

Disusun Oleh :

Nama	: Tiara Amanda Yaza Putri
NIM	: 01101002073
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 8/6 - 2014

Ketua

Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc
NIP. 195211261980121001

Tanggal : 9/6 - 2014

Anggota

Imelda S.E, M.SE
NIP. 197703092009122002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2002-2012

Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa	: Tiara Amanda Yaza Putri
NIM	: 01101002073
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 16 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 19 Juni 2014

Ketua	Anggota	Anggota
Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc	Imelda, S.E, M.SE	Dr. Azwardi, S.E, M.Si
195211261980121001	197703092009122002	196805181993031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Azwardi, S.E, M.Si
196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tiara Amanda Yaza Putri

NIM : 01101002073

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : **Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Sumatera Selatan Tahun 2002-2012**

Pembimbing :

Ketua : Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc

Anggota : Imelda, S.E, M.S.E

Tanggal Ujian : 16 Juni 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 20 Juni 2014

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

96D83ABF520524948

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Tiara Amanda Yaza Putri

01101002073

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa	: Tiara Amanda Yaza Putri
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang / 27 Januari 1993
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah (Orangtua)	: Jl. Landak 2 Blok I No. 20 Komplek Kedamaian Permai Palembang 30114
Alamat Email	: amandatiarayp@yahoo.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar	: SD 2 Yayasan Sosial Pendidikan Pusri
SLTP	: SMP Yayasan Sosial Pendidikan Pusri
SMU	: SMA Plus Negeri 5 Palembang

Pendidikan Non Formal	: LBPP LIA Palembang
Pengalaman Organisasi	: Kepala Divisi Minat dan Bakat EFECS FEUNSRI Anggota Divisi Kerohanian HIMEPA FE UNSRI Anggota Divisi Dana dan Usaha HIMEPA FE UNSRI
Penghargaan Prestasi	: Bujang Gadis Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Sumatera Selatan Tahun 2002-2012". Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai dampak variabel desentralisasi fiskal dan ketimpangan wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi, serta dampak variabel desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah tahun 2002-2012. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan
3. Sekretaris Jurusan
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya, Juni 2014

Tiara Amanda Yaza P

ABSTRAK

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2002-2012

Oleh:

Tiara Amanda Yaza Putri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2002-2012. Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah derajat desentralisasi fiskal dan ketimpangan wilayah dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu untuk ketimpangan wilayah, variabel yang diteliti adalah derajat desentralisasi fiskal dan tingkat pertumbuhan ekonomi dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggunakan model regresi data panel dan model *fixed effect* sebagai analisis.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 5,197680, dan ketimpangan wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,031667. Sedangkan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah berpengaruh negatif dengan koefisien regresi sebesar -0,035615, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah berpengaruh positif dengan koefisien regresi sebesar 0,005131.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah

ABTSRACT

THE INFLUENCE OF FISCAL DESENTRALISATION ON THE ECONOMIC GROWTH AND REGIONAL INEQUALITY IN SOUTHERN SUMATERA IN 2002-2012

By:
Tiara Amanda Yaza Putri; Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc.; Imelda, S.E.,M.S.E

This study was aimed at analyzing the influence of fiscal decentralization on the economic growth and regional inequality in 15 districts/cities in Southern Sumatera Province in 2002-2012. The degree of fiscal decentralization and regional inequality and their influence on the economic growth in 15 districts/cities in Southern Sumatera province were the variables under investigation. Moreover, in regional inequality, the degree of fiscal decentralization and economic growth in 15 districts/cities in Southern Sumatera province were the variables under investigation. Data Panel Regression and Fixed Effect were used to analyze the data.

It was found that fiscal decentralization had positive influences on the economic growth and regional inequality with regression coefficient 5.197680 and 5.031667 respectively. Additionally, fiscal decentralization had a negative influence on the regional inequality with regression coefficient -0.035615. The economic growth had a positive influence on the regional inequality with regression coefficient 0.005131.

Keywords: Fiscal Decentralization, Economic Growth, Regional Inequality

Acknowledged by,

Hariswan P.J.,M.Pd.
Email: hariswan@yahoo.com
Language Laboratory, Graduate School of Sriwijaya University

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 142726
TANGGAL : 20 AUG 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 9

1.3. Tujuan Penelitian 9

1.4. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

2.1 Landasan Teori

2.1.1. *Fiscal Federalism Theory* 11

2.1.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal 13

2.1.1.2 Jenis-Jenis Desentralisasi Fiskal 16

2.1.1.3 Pengertian dan Jenis-Jenis Transfer 17

2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 17

2.1.3. Konsep Produk Domestik Dalam Bruto 23

2.1.3.1 Metode Penghitungan PDRB 24

2.1.4 Teori Ketimpangan Wilayah 27

2.1.4.1 Trickle Down Effect & Polarization Effect..... 28
2.1.4.2 Spread Effect & Backwash Effect..... 28
2.1.4.3 Hipotesis Kuznet 29
2.1.4.4 Pengukuran Ketimpangan 30
2.2. Penelitian Terdahulu 34
2.3. Kerangka Pemikiran 37

BAB III METODE PENELITIAN 39
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 39
3.2. Jenis dan Sumber Data 39
3.3. Definisi Operasional Variabel 40
3.4. Metode Analisis 41
3.4.1. Estimasi Regresi Model Data Panel 43
3.4.2. Uji Hausman..... 47
3.4.3. Pengujian Statistik Analisis Regresi 47
3.4.3.1 Koefisien Determinasi (R^2) 47
3.4.3.2 Model Estimasi Regresi Panel 48
3.4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji f) 49
3.4.3.4 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 52
4.1. Hasil Penelitian 52
4.1.1. Gambaran Umum Variabel Makro Penelitian 52
4.1.1.1 Potensi Sumber Daya Provinsi Sumatera Selatan.. 54
4.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 56
4.1.1.3 Perkembangan APBD Provinsi Sumatera Selatan. 62

DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN 105

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004. Praktek desentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 yang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah "*Money Follows Functions*", yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Desentralisasi merupakan suatu tuntutan reformasi yaitu adanya keadilan dalam bidang politik dan ekonomi bagi masyarakat daerah. Keadilan yang masih dirasakan kurang ini dianggap sebagai penyebab munculnya rasa tidak puas terhadap pemerintah oleh masyarakat daerah. Allen (dikutip dalam Kuncoro, 2004) menyatakan bahwa, sejarah perekonomian telah mencatat desentralisasi telah muncul sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan.

Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan pusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa

pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan penuh dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan antar wilayah, dikarenakan setiap wilayah dilimpahkan wewenang dalam pengelolaan keuangan, yang menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri dan dapat menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan.

Menurut pendapat Smith (dikutip dalam Jhingan, 2004), menjelaskan bahwa sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa sebagian besar negara berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal, yaitu, untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik.

Konsep desentralisasi menurut Bryant dan White (2007) yang menekankan pada salah satu cara untuk pengembangan kapasitas lokal, yaitu potensi kemampuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada pada setiap wilayah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Tentu saja hal ini sejalan dengan hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai positif. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, maka dapat memeratakan pembangunan di suatu daerah dan mengurangi tingkat ketimpangan pada daerah. Konsep ini dapat pula diaplikasikan dalam rangka pengembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terutama untuk mempengaruhi para pengambil keputusan yang masih menyangsikan atau

mengkhawatirkan kemungkinan timbulnya disintegrasi dalam melaksanakan otonomi daerah. Midjaja (dikutip dalam Syafrudin, 1992) mengemukakan bahwa "Otonomi daerah dapat menimbulkan disintegrasi dan karena itu harus diwaspadai". Penerimaan desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, antara lain yaitu (Kaloh, 2002: 60): (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iii) faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; serta (iv) faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus

mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaran otonominya.

Otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pendapatan antar wilayah, dikarenakan setiap wilayah dilimpahkan wewenang dalam pengelolaan keuangan, yang menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri, yang berarti dapat menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah serta dapat mengelola keuangan untuk melaksanakan pemerintahannya.

Menurut para ahli, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif. Sejalan dengan penelitian Bohte dan Meier (2000) yang melakukan perbandingan pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan yang tersentralisasi dengan pemerintahan terdesentralisasi. Kedua peneliti ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi pada pemerintahan yang terdesentralisasi. Fakta empiris ini juga mendukung temuan Lin dan Liu (2000) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, desentralisasi fiskal sering kali tidak berjalan seiringan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataaan pembangunan. Hasil studi dari beberapa ahli seperti Davodi dan Zou (1998) serta Woller dan Phillips (1998) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Menurut Zhang

dan Zou (1998) serta Xie, *et al.* (1999), mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kurang menguntungkan bagi pembangunan.

Dari pendapat para ahli disimpulkan bahwa, hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berbeda-beda, sebagian berpendapat negatif, dan sebagian berpendapat positif. Perbedaan hasil temuan para ahli ini disinyalir karena tidak semua daerah yang diteliti benar-benar siap dalam menjalankan desentralisasi fiskal. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh karena itu, desentralisasi fiskal akan bermanfaat dan mendukung pembangunan nasional jika dilaksanakan secara optimal dan didukung oleh kemampuan financial yang memadai oleh daerah otonom. Laju pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia meningkat setelah dilaksanakannya desentralisasi fiskal, namun ada pula daerah yang masih belum cukup melaksanakan desentralisasi fiskal secara optimal, sehingga tidak berdampak secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Secara administratif, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 11 (sebelas) pemerintah kabupaten dan 4 (empat) pemerintah kota, dengan Palembang sebagai ibukota Provinsi. Sejak tahun 1999, ada pemekaran daerah dan sudah terbentuk delapan kabupaten/kota baru. Hingga saat ini, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 15 kabupaten/kota. Diantaranya, Pagar Alam pemekaran dari Lahat 21 Juni 2001, Prabumulih pemekaran dari Muara Enim 21 Juni 2001, Lubuklinggau pemekaran dari Musi Rawas 21 Juni 2001. Kemudian Kabupaten Banyuasin, pemekaran dari Musi Banyuasin pada 10 Oktober 2002, Ogan Ilir pemekaran dari Ogan Komering

Ilir 18 Desember 2003, Ogan Komering Ulu Selatan, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, 18 Desember 2003, Ogan Komering Ulu Timur pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, 18 Desember 2003, dan Empat Lawang pemekaran dari Kabupaten Lahat pada 2 Januari 2007. Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, Sumatera Selatan memiliki 11 kabupaten, 4 kota, 212 kecamatan, 354 kelurahan, 2.589 desa.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik dan kekayaan sumber daya alam yang beragam di setiap kabupaten/kota. Diferensiasi karakteristik wilayah mengakibatkan adanya perbedaan potensi kualitas sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Hal ini juga didorong oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia yang ada di berbagai wilayah. Dengan adanya perbedaan inilah, sering kali terjadi ketimpangan pendapatan antar wilayah, yang akan berdampak pada laju pemerataan pembangunan wilayah yang timpang.

Ketimpangan pendapatan regional dapat didefinisikan sebagai perbedaan kontribusi terhadap pembangunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik antar daerah maupun antar sektor dikarenakan adanya potensi sumber daya alam yang ada, kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi negara (Safrizal, 2001).

Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, ada beberapa faktor terjadinya fenomena ketimpangan di Sumatera Selatan, yaitu: i) ketimpangan ekonomi dalam rangka pemerataan pertumbuhan (produktivitas ekonomi); ii) ketimpangan infrastuktur dengan membandingkan jumlah fasilitas dan prasarana

wilayah; iii) ketimpangan sosial yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan data PDRB.

Tingkat ketimpangan antar wilayah di Sumatera Selatan dapat dilihat dari jumlah penduduk per kapita, PDRB per kabupaten/kota dan provinsi, melalui perhitungan Indeks Williamson yang akan diteliti pada skripsi ini, lihat tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2000 di Sumatera Selatan tahun 2002, 2007 dan 2012.

	2002		2007		2012	
Kabupaten/Kota	**Jumlah Penduduk**	**PDRB**	**Jumlah Penduduk**	**PDRB**	**Jumlah Penduduk**	**PDRB**
Ogan Komering Ulu	1.193.218	2.024.039	262.283	2.468.624	338.369	3.567.980
Ogan Komering Ilir	1.017.155	3.056.136	685.296	1.491.622	752.906	3.776.931
Muara Enim	740.338	5.804.715	653.304	7.300.405	741.795	9.435.082
Lahat	680.040	2.414.777	341.547	2.292.062	380.398	3.215.100
Musi Rawas	665.079	2.472.374	492.437	3.127.521	543.349	4.075.634
Musi Banyuasin	1.309.744	9.242.810	497.864	10.541.003	587.325	12.329.570
Banyuasin		3.148.446	778.627	3.800.705	773.878	5.231.786
Ogan Komering Ulu Selatan	1.505.304	829.029	326.162	1.077.964	324.836	1.534.218
Ogan Komering Ulu Timur	*	1.518.813	571.557	2.001.672	628.827	2.678.969
Ogan Ilir	*	*	372.431	1.492.710	392.989	1.995.979
Empat Lawang	*	*	211.546	818.291	225.737	1.079.138
Palembang	1.505.304	10.895.982	1.394.954	14.998.693	1.503.845	21.570.086
Prabumulih	126.172	972.081	134.686	1.208.219	169.022	1.555.323
Pagar Alam	*	451.731	116.102	538.181	129.719	683.410
Lubuk Linggau	166.006	707.221	181.068	940.437	208.893	12.801.466
Sumatera Selatan	**7.110.878**	**45.002.000**	**7.019.864**	**54.098.109**	**7.701.528**	**72.094.166**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Catatan : *) Angka masih tergabung dengan kabupaten induk.

Kinerja ekonomi Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto yang meningkat setiap tahunnya. Dapat kita lihat secara umum, pada tahun 2002, PDRB Sumatera Selatan sebesar Rp. 45.002.000, lalu pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 54.098.109 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 72.094.166. Meningkatnya PDRB berdampak positif pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan di Provinsi Sumatera Selatan. Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2002 sebesar 7.110.878 jiwa, sedangkan pada tahun 2007 menurun sedikit menjadi 7.019.864 jiwa, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 7.701.528 jiwa.

Konsep desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik dan berdaya saing tinggi serta dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan secara vertikal maupun horizontal (Simanjuntak, 2005). Namun dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997).

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat bervariasi antar daerah setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, disinyalir terjadi peningkatan ketimpangan antar daerah. Tetapi tidak dapat disangkal juga bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di

berbagai daerah. Oleh karena itu, saya akan menulis skripsi yang berjudul ***"Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Sumatera Selatan"*** , dengan tujuan agar dapat mengetahui seberapa besar desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di Sumatera Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan wilayah di Sumatera Selatan diukur berdasarkan Indeks Williamson.
2. Seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal di Sumatera Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah di Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak yang terjadi akibat adanya desentralisasi fiskal di provinsi Sumatera Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kabupaten antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2002-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai referensi, memberikan informasi, menambah pengetahuan akan dampak yang terjadi akibat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan juga diharapkan dapat memberikan

masukan bagi aparatur pemerintah (khususnya pemerintah Sumatera Selatan) yang dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dimasa datang. Di samping itu, penelitian ini diharapkan menjadi pemicu penelitian yang lebih lanjut dalam bidang kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali". *Jurnal Ekonomi STEI*, No. 2/XIII/25

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan.* Edisi 5. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (1st ed.).* Yogyakarta : BPFE.

Asngari, Imam. 2008. *Modul Praktikum Ekonometrika Program Eviews dan SPSS.* Palembang: Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Azwar, Syafrudin. 1992. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Azwardi. 2007. "The Impact of Fiscal Decentralization on Interregional Economic Performance In Indonesia". *Parallel Session IA : Fiscal Decentralization.* 12 Desember 2007. *IRSA* Kampus Universitas Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS). *Sumatera Selatan Dalam Angka.* Berbagai Edisi. Provinsi Sumatera Selatan

Bahl, Roy. 2000. "China: Evaluating The Impact of Intergovernmental Fiscal Reform in Fiscal Decentralization in Developing Countries". *Cambridge University Press.* Vol X, No.13

Barzelay, M. 1991. "Managing Local Development, Lesson From Spain". *Policy Science* No. 24, 271-290

Bashir, Abdul dan Syamsurijal. 2012. "Potret Perekonomian Daerah Setelah Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sumatera Selatan". *Materi Kongres ISEI XVIII.* Yogyakarta

Bohte, John dan Kenneth J Meier. 2000. *The Marble Cake : Introducing Federalism to The Government Growth Equation.* Publius. Summer. Hal : 35 – 99.

Bonet, Jaime. 2006. "Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities; Evidence From the Colombian experience".*Original Version. JEL Classification* H77-O18-R11-R58.

Christian Lesmann, 2007, "Fiscal Decentralization and Regional Disparity: Evidence From Cross-Section and Panel Data", *Dresden Discussion Paper in Economics.* No 08/09. Hal 28

Ebel, Robert D and Seidar Yilmaz. 2002. "Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview". *World Bank Institute*. Available: http://www.worldbank.org

Gujarati, Damodar. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Buku 1 Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat

Hadi Sasana, Maret 2009, "Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam Era Desentralisasi Fiskal", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol 16 no 1, hal 50-59.

Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Jin, Jing and Heng-Fu Zou. 2000. "Fiscal Decentralization and Economic Growth in China". *World Bank. Working Paper Series*. No. 1452. http://www.worldbank.org

Kaloh, Joseph Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. Jakarta : Raja Grafindo

Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang* : BPFE Universitas Brawijaya

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.

Kuncoro, Mudrajat dan Mansim, Naftali. 2012. "Dampak Desentralisasi Fiskla Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota: Tinjauan Empiris di Papua Barat, 2004-2009". *Materi Kongres ISEI XVIII*. Yogyakarta

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. 'Fiscal Decentralization and Economic Growth in China". *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49. Hal : 1 – 21.

Nanga, Muana. 2001. *Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Prishardoyo, Bambang. 2008. "Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2002-2005". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Jurusan EP FE UNNES*. Vol 1, No 1. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Proud 'homme, Remy. 1995. "On The Danger of Decentralization, Washington DC". *World Bank Policy Research Working Paper*, Vol. 1252

Sidik, M. 2002. "Kebijakan, Implementasi, dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah", dalam *seminar nasional*

Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Yogyakarta, 20 April 2002.

Sjafrizal. 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat". *Prisma LP3ES*, No. 3/XXVI

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang : Baduose Media

Slinko, Irina. 2002. "Fiscal Decentralization on The Budget Revenue Inequity among Munipacalities and Growth Russian Regions". Available: http://www.econpapers.repec.org

Sugiyanto. 2002. "Kemandirian dan Otonomi Daerah". *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol XII, No.1 Hal: 1-7, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Sukirno, Sadono. 2000. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.

Sukirno, Sadono. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPFE UI.

Susetyo, Didik. 2010. Desentralisasi Fiskal, Kesenjangan Fiskal, dan Disparitas Regional. *Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang

Tambunan, T. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Tarigan, Robinson. 2009. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Todaro, M.P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.)*. Jakarta : Erlangga.

Vasquez, Jorge Martinez and Robert Mc Nab. 2001. "Fiscal Decentralization and Economic Growth". *Working Papers, Andrew Young School of Policy Studies*. Available: http://www.ecopapers.repec.org

Woller, Gary M and Kerk Phillips. 1998. "Fiscal Decentralization and LDC Economy Growth: An Empirical Studies". *Departement of Economics Bringham Young University*. Vol 34 no. 4

Zhang T and Heng-Fu Zou. 1998. "Fiscal Decentralization and Economic Growth in China". *Jounal of Public Economics* Vol. 67, 221-240.